

PENANTIAN PANJANG  
REFORMASI POLRI

## DAFTAR ISI

Prakata .....	
Kata Pengantar .....	
Biodata Penulis .....	
Daftar Isi .....	
<b>BAGIAN 1•PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KULTUR POLRI</b>	
Bab 1 Penantian yang Panjang: Reformasi Polri Menuju Perpolisian Demokratik .....	
Bab 2 Dilema Reformasi Polri .....	
Bab 3 <i>Quo Vadis</i> Reformasi Polri .....	
Bab 4 TNI dan Polri Pasca Pemisahan: Analisis tentang Penataan Kelembagaan Politik dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia .....	
Bab 5 Polri dan Kultur Militer .....	
Bab 6 Upaya Mereduksi Budaya Militer dalam Pendidikan Polri .....	
<b>BAGIAN 2•POLITIK DAN KESEJAHTERAAN POLRI</b>	
Bab 7 Mendesak UU Keamanan Nasional? .....	
Bab 8 RUU Keamanan Nasional dan Reposisi Polri .....	
Bab 9 Mengharap Hak Politik TNI/Polri .....	
Bab 10 Menyejahterakan Polisi .....	

### BAGIAN 3•REFORMASI BRIMOB POLRI

Bab 11 Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil .....	
Bab 12 Reformasi Brimob Polri Di Simpang Jalan!!! .....	
Bab 13 Brimob Polri dan Harapan Masyarakat .....	

### BAGIAN 4•DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI DAN TERORISME

Bab 14 Densus 88 AT Polri: Peran dan Koordinasi dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia .....	
Bab 15 Prestasi dan Anomali Polri .....	

### BAGIAN 5•INTELIJEN KEAMANAN POLRI

Bab 16 Intelijen Negara dan Intelijen Keamanan: Perspektif Kepimpinan Politik dan Efektivitas Koordinasi .....	
Bab 17 Efektivitas Intelijen Polri dalam Negara Demokratis .....	

### BAGIAN 6•POLRI DAN PERPOLISIAN MASYARAKAT

Bab 18 Implementasi Perpolisian Masyarakat Terbentuk Realitas .....	
Bab 19 Perpolisian Masyarakat Berbasis Kultur Indonesia.....	
Bab 20 <i>Community Policing</i> dalam Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme .....	

### BAGIAN 7•POLRI DAN PENCITRAAN

Bab 21 Konflik Poso, Kamdagri, dan Citra Polri .....	
Bab 22 Faktor Determinan Polantas dalam Reformasi Polri .....	
Bab 23 Polwan dan Pencitraan Polri .....	

**BAGIAN 1**

**PENATAAN LEMBAGA DAN KULTUR POLRI**

## Bab 1

### Penantian yang Panjang: Reformasi Polri Menuju Perpolisian Demokratis\*

#### ABSTRACT

*Eight years after separating from Armed Force of Indonesia (TNI), Indonesian National Police (Polri) has not yet to be a professional police institution in democratic policing context. Polri still committed violent practices, and it indicates that as an institution Polri has not yet finished its internal reform. Any kind of Polri's problem consists of both internal and external such as oversight by internal, parliament, and public, educational practices in police academy, until the institution averse to sharing the police management with the local government. This article argues that the core problems are from the institution itself, the indolence of institution to response any problem, and the public hopes. Those are the reason why Polri does not finish the internal reform yet. This article also offers the solutions to regulate Polri to be accordance with democracy agenda in Indonesia and with democratic policing context. It's also hopefully that Polri is capable to proof as a professional and civilian police institution.*

Keywords: Polri, perpolisian demokratis, reformasi polisi, kebijakan politik, kontrol masyarakat.

#### • Pendahuluan

- 
- Pernah dimuat dalam Jurnal *Governance*, Lemlit Universitas Padjadjaran, Januari 2008. Versi Inggris dari tulisan ini menjadi makalah pengantar pada *Temu Ilmiah Internasional Mahasiswa Indonesia (TIIMI)*, November 2007, di London Inggris.

Pada tanggal 28 Agustus 2007, Niasari, gadis yang baru lulus SMP dan berasal dari keluarga baik-baik, ditemukan tewas di dekat Kantor Desa Cibinong, Jawa Barat dengan luka tembak di kepalanya. Tewasnya Niasari sempat mengundang kontroversi. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Bogor mengatakan tewasnya Niasari karena tembakan seorang anggota Intelkam Polres (Kepolisian Resor) Bogor lantaran gadis itu hendak merebut motor dari anggota polisi tersebut. Akibatnya, anggota polisi itu menembak perempuan belia tersebut. Sementara Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Jawa Barat mengungkapkan bahwa anggota Intelkam Polres Bogor yang menembak Niasari telah melanggar hukum karena aparat polisi itu hendak memperlakukan korban dengan tidak senonoh. Penolakan korban membuat pelaku marah dan menembak kepala korban hingga tewas.<sup>1</sup> Perbedaan pernyataan antar pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait permasalahan tersebut memberikan penegasan bahwa secara kelembagaan Polri masih belum selesai dalam mentransformasi diri agar sesuai dengan konteks polisi sipil dan demokratis. Bahkan, tersebar dugaan bahwa reformasi Polri hanya terjadi pada tataran luar, sementara unsur-unsur dalamnya tidak tersentuh secara menyeluruh. Dugaan ini kian menguat karena praktik kekerasan oleh Polri tidak hanya didominasi oleh anggota Brimob (Brigade Mobil), yang memang menjadi pasukan paramiliter Polri, tetapi juga menyebar ke kesatuan lain.<sup>2</sup>

Peristiwa di atas merupakan suatu gambaran bahwa Polri sebagai lembaga keamanan belum sungguh-sungguh melakukan reformasi diri. Bahkan, setelah lebih dari delapan tahun berpisah dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), permasalahan yang terkait dengan perilaku

---

1 Lebih lanjut lihat. "Kapolda Jawa Barat: Bripka SW Melakukan Tindakan Tidak Senonoh, Niasari Sengaja Ditembak", *Pikiran Rakyat*, 1 September 2007.

2 Lihat Marpaung, Rusdi (ed). 2007. *Praktik Brutalitas Polisi di Masa Transisi*. Jakarta: Imparsial. Bandingkan dengan *Buletin Polisi* Edisi Februari dan Maret. 2006, Jakarta: The RIDEP Institute. Lihat juga Muradi "Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil" dalam Sukadis, Beni (eds). 2007. *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*. Jakarta: Lesperssi-DCAF.

yang cenderung tidak memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sipil masih menjadi “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan. Sejak kelahirannya, peran Polri memang sudah sarat dengan pendekatan militer. Dengan pembenaran bahwa Polri adalah salah satu kepolisian di dunia yang berjuang bahu-membahu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan,<sup>3</sup> maka tidak mengherankan apabila dalam aktivitas kesehariannya Polri cenderung menjadi lembaga yang paramiliteristik ketimbang sebagai lembaga kepolisian seperti di negara-negara lain.<sup>4</sup>

Sejak kelahirannya pada 1 Juli 1946, Polri telah mengabdikan secara penuh kepada bangsa dan negara. Dinamika sosial dan politik di tanah air tidak menyurutkan Polri sebagai lembaga untuk membangun dan menciptakan rasa aman bagi rakyat Indonesia.<sup>5</sup> Sekalipun demikian, perjalanan sejarah bangsa Indonesia ternyata ikut pula membawa kedudukan Polri dalam pemerintahan mengaruhi dinamika politik. Berbagai peristiwa politik sejak bangsa ini berdiri menjadi satu tantangan tersendiri bagi Polri. Konflik yang disebabkan oleh sistem politik yang berubah – dari sistem satu partai di awal kemerdekaan, kemudian Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila oleh Orde Baru – menjadi bagian terpenting

3 Agaknya hal tersebutlah yang menjadi kebanggaan semu dan dipelihara hingga saat ini. Anggota Polri kerap merasa bangga karena ikut bahu-membahu dalam merebut kemerdekaan. Bahkan dalam websitenya <http://www.polri.go.id> diungkapkan bagaimana Polri sebagai insituasi yang juga ikut berperang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan banyak dari perwira Polri angkatan pertama pernah menjadi perwira atau kadet dari ketiga angkatan dalam militer Indonesia, yang kemudian berpindah, salah satunya adalah mantan Kapolri, Husein Iman Santoso. Lebih lanjut lihat KH. Ramadhan, Abrar Yusa. 1993. *Hugeng: Polisi Idaman dan Kenyataan*. Jakarta: Sinar Harapan. Lihat juga Muradi. “Polri dan Kultur Militeristik”. *Background Paper*, Disampaikan pada Seminar *Police Accountability in Democratic Transition*, yang diselenggarakan oleh Lesperssi-DCAF. Ambhara Hotel, Jakarta, 3 September 2007.

4 Bandingkan dengan tulisan Peter Cassidy, “US: The Rise in Paramilitary Policing” dalam <http://www.mapinc.org/drugnews/v97/n673/a02.html>.

5 K.H. Ramadhan. *op.cit.* hal. 124. Lihat juga tulisan Letjen (Pol.) Kunarto tatkala masih menjabat Kapolri, “Masyarakat Hanya Ingin Ketentraman”, dalam *Kompas*, 1 Juli 1997.

dalam tugas-tugas Polri. Realitas proses perubahan sistem politik yang diikuti dengan berbagai konflik membuat Polri harus berperan aktif untuk meredakan konflik-konflik tersebut agar tidak mengarah kepada perpecahan bangsa.<sup>6</sup>

Sebenarnya, sejak didirikan, Polri telah berupaya memosisikan diri sebagai lembaga sipil. Hal ini terlihat dengan adanya Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 tentang Pembentukan Jawatan Kepolisian Negara yang menetapkan statusnya berada di bawah Perdana Menteri. Namun, dengan berbagai proses perubahan ketatanegaraan dan aspek legal formal hingga terbitnya UU Pokok Kepolisian No. 13/1961, telah ditegaskan bahwa Polri berposisi sebagai salah satu unsur dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Akibatnya, terjadi internalisasi nilai-nilai militer di dalam tubuh dan struktur Polri. Apalagi sejak dikeluarkannya Keppres No. 155/1965 tertanggal 6 Juli 1965 perihal disamakannya pendidikan pada level akademi bagi ABRI dan Polri. Baru setelah itu, para taruna dikembalikan ke akademi masing-masing. Ketetapan ini jelas-jelas mengubah wajah Polri dari yang berkarakter sipil menjadi militer dengan berbagai atributnya.<sup>7</sup>

Perubahan sebagaimana disebut di atas tentunya amat mempengaruhi kinerja Polri, khususnya dalam operasionalisasi peran dan fungsinya sebagai alat keamanan negara. Akibatnya, upaya untuk mendorong proses demokrasi sebagai bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat kemajemukan dan pluralisme hampir-hampir tidak terjadi. Yang terjadi justru sebaliknya. Polri menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk meredakan aspirasi demokratis

6 Lihat misalnya Kunarto. 2002. *Merenungi Satu Realitas Polri dalam Cobaan*. Jakarta: Cipta Manunggal, hal. 15. Bandingkan dengan Reiner, Robert, 2000, *The Politics of the Police*, Oxford University Press.

7 Secara politis dan sosiologis, pergeseran posisi Polri dari di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, lantas di bawah Perdana Menteri, serta menjadi Kementerian tersendiri, dan di bawah ABRI, membuat Polri secara kelembagaan termarginalkan oleh lembaga-lembaga induknya. Tak heran bila kemudian Polri ketika terpisah dari lembaga-lembaga tersebut, perwatakan dan kultur kelembagaan yang memayunginya masih melekat dalam keseharian Polri hingga saat ini. Lebih lanjut lihat Muradi “Polri dan Kultur Militeristik”. *op.cit.*